

Agensi Perempuan Pedesaan

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan

Artikel

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh

Abdullah Abdul Muthaleb

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Dewi Komalasari

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan ditengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

www.indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2019



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan/ *Rural Women's Agency* iii

Artikel

- Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria/ *The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform* 289-297
Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
- Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat/ *Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua* 299-310
Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
- Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh/ *Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency* 311-320
Abdullah Abdul Muthaleb
- Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan/ *Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution* 321-333
Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar
- Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan/ *When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan* 335-349
Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi
- Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo/ *Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village* 351-361
Dewi Komalasari
- Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi/ *Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces* 363-375
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Agensi Perempuan Pedesaan *Rural Women's Agency*

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, ketimpangan ini bersilang sengkabut dengan diskriminasi berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai "*the second sex*", pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya *Gender in the Mirror: Cultural Imagery & Women Agency (2002)* menganalisa bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai makhluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-studi feminisme. Feminisme pun menemukan konsep pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (*feminist political ecology*). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminisme pun masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, objek kemiskinan, atau objek pembangunan.

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat membaca! (Atnike Nova Sigiro)

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres
No. 86/2018 tentang Reforma Agraria**

*The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation
No. 86/2018 on Agrarian Reform*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel,
15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressed with the agrarian reform's agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration's priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform's policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women's movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan pedesaan, redistribusi tanah.

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
(Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia)

**Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang
Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat -
Papua Barat**

*Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting
Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies
- Western Papua*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 299-310, 4
gambar, 15 daftar pustaka.

This research examines women's role and their decision-making related to swidden farming. This research was conducted in two different regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key informants in this research were indigenous Papuan women, their husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that in the realm of traditional agriculture, women play important roles, starting from production, plant nursery, to the crop distribution to market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (*swidden farming*). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat pertanian modern canggih lainnya.

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar tradisional, komoditas pertanian.

Abdullah Abdul Muthaleb
(Flower Aceh, Banda Aceh, Indonesia)

**Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam:
Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh**

*Rural Women and Information on Natural Resources:
Rural Women in Aceh's Struggle for Agency*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 311-320, 2 tabel,
10 daftar pustaka.

Rural women have the potential to mobilize herself and her community towards a sovereign and just rural community. However, rural women frequently face form of discrimination that impede them to achieve their maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those gender-based discrimination also prevent women from participating in land and forest governance that is vital for the rural community's livelihood. An example of form of gender-based discrimination experienced by women in several regions in Aceh is discrimination in accessing public information. This article describes and analyzes several Aceh women's experiences in using the rights-based approach on access to information. The women in this article have used the Law on Public Information as the basis for their advocacy towards the land and forest governance in their residential area. These experiences of the rural women have shown shows that women have not only interests upon the information on natural resources, but they also possess capability, perseverance, and will to obtain such information.

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk,

diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang merebut informasi.

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, informasi publik.

¹Titiek Kartika Hendrastiti & ²Pramasti Ayu Kusdinar
(¹Universitas Bengkulu & ²Akar Foundation, Bengkulu, Indonesia)

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 321-333, 2 gambar, 32 daftar pustaka.

This article is a study of feminist ecological politics in rural women's leadership and their involvement in resolving conflicts over protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, *adat*, and religious practices that prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers.

Keywords: rural women's leadership, feminist political ecology, forest conflict

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan pedesaan dan keterlibatan mereka dalam pusran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktur, eksklusi sosial, dan membongkar sekat kelas ekonomi.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

¹Catharina Indirastuti & ²Andi Misbahul Pratiwi
(¹Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Jakarta, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 335-349, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has not been widely applied in the management of peatlands, instead of being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical environmental governance politics. This study shows the political complexity of peatland governance and its impact on women with a feminist political ecology lens. This research was conducted in several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were realized that there are problems with peatland governance, both practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living space, women find it difficult to get water and food sources, women take over the role of the head of the family because men migrate but are not always recognized as the head of the family, and women are impoverished because they lose their independence and must work as oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist political ecology, resource governance

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandiriannya dan harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem gambut.

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi politik feminis, tata kelola sumber daya

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 351-361, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also excludes the excluded people from development process in the village. This article discusses the social exclusion experienced by community of local belief's groups, the *Association of Ekhasing Budi Murko* (PEBM) in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. The economic empowerment approach has been used to promote inclusion among communities in the village. The establishment of Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works have encouraged women's role as agent for social inclusion. Business activities established by PEBM have opened room for interaction between women from local belief's community with other women in the village.

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women's empowerment, women's agency

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial budaya. Eksklusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan *Ekhasing Budi Murko* di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghayat di desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di desa.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, pemberdayaan perempuan, agensi perempuan

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 363-375, 2 tabel, 12 daftar pustaka.

Women in rural areas face serious problems as a result of ecological social changes in the village—which are almost mutually interconnected with the expansion of extractive industries and rural development paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land governance are one of the ways to reduce the risk of environmental damage & degradation, land use change, deforestation, and loss of food resources and livelihoods of rural communities. One of the principles of sustainable forest and land governance is transparency and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how the social ecological changes in the villages through the experiences of women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of rural women in seizing the right to information and participation in the process of forest and land governance; 3) women's agency in creating positive socio-ecological changes in the village area. This research found that women's agencies are not single and are produced from various forms of power, namely the power/ability to influence and reduce barriers, to change at the household and community level, the power to organize and change existing hierarchies, the power to increase individual awareness and the desire to change, the strength of collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women's agency, environmental degradation, sustainable environment.

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelintan dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (*power*) yakni kekuatan/kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan.

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat

Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran Malang, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

hatibabdulkadir@ub.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 14 Oktober 2019, direvisi 5 November 2019, diputuskan diterima 21 November 2019

Abstract

This research examines women's role and their decision-making related to swidden farming. This research was conducted in two different regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key informants in this research were indigenous Papuan women, their husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that in the realm of traditional agriculture, women play important roles, starting from production, plant nursery, to the crop distribution to market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, taking decision, traditional market, agriculture commodities.

Abstrak

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (*swidden farming*). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat pertanian modern canggih lainnya.

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar tradisional, komoditas pertanian.

Pendahuluan

Artikel ini mengangkat pengalaman *mama-mama* atau peladang perempuan Papua di Kabupaten Maybrat dalam mengelola metode pertanian tradisional. Artikel ini mencatat pengalaman para peladang perempuan dalam memadukan sistem berkebun berpindah dengan tanaman komersial hortikultura yang mengharuskan petani menetap dalam merawatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah hendak melihat ekonomi campuran antara menanam tanaman subsisten untuk keperluan sehari-hari dengan tanaman komersial untuk mendapatkan uang kontan. Penelitian ini menemukan pengalaman *mama-mama* dalam menjaga kondisi ekologis perladangan meski harus melakukan adaptasi terhadap kebutuhan keuangan.

Meminjam istilah King dan Wilder (2012) *mama-mama* peladang ini mempraktikkan sistem ekonomi campuran

(*mixed economy*) yakni memadukan antara tanaman untuk kebutuhan rumah tangga dengan tanaman untuk kebutuhan pasar nasional maupun global. Praktik ini dikembangkan dari konsep klasik Boeke (1953), tentang masyarakat mendua (*dual society*) yakni masyarakat yang masih menerapkan sistem ekonomi subsisten, namun pada saat yang sama juga memeluk motif mencari keuntungan dan mengintegrasikan diri mereka ke pasar dengan cara meningkatkan produksi pertanian.

Budaya pertanian komersial berbeda dengan budaya perladangan berpindah yang dilakukan oleh orang Papua. Perladangan berpindah membutuhkan jumlah jam kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian sawah dan hortikultura. Keterlibatan petani dalam pertanian komersial berarti mengharuskan mereka untuk disiplin dalam menjalani rezim produksi (Tsing 2008). Sedangkan sistem perladangan di Papua Barat adalah campuran antara hutan, kebun dan tanaman hortikultura. Sistem

ini merupakan campuran antara aspirasi petani terhadap tanaman komersial sekaligus upaya petani untuk mempertahankan tanaman subsisten.

Di mata pembangunan pertanian, petani yang sukses adalah mereka yang telah mengadopsi sistem pertanian hortikultura dan yang menjalankan sistem pertanian menetap. Alasannya, tentu saja bukan hanya sistem yang mampu meningkatkan produksi, namun tanaman ini juga dapat diukur tingkat produksinya. Petani lokal Papua yang telah mengikuti sistem transmigrasi dilihat sebagai petani yang sukses. Sebaliknya, mereka yang masih pola berpindah adalah petani terisolasi. Pemerintah, sejak jaman administrasi kolonial mempunyai kepentingan untuk membuat para petani menetap agar mereka dapat memproduksi tanaman produktif, mudah dikontrol dan dikenai pajak (Kadir 2016; Scott 2011). Selain untuk menambah keragaman gizi bagi masyarakatnya (Boekorsjom 2012) inilah definisi petani yang efektif dalam pandangan pemerintah.

Dengan kata lain, dalam kacamata pemerintah, yang seharusnya berotasi adalah tanamannya bukan tanahnya. Pandangan ini mempunyai bias kultural sistem pertanian Jawa di mana rotasi tanaman merupakan eksekusi dari padatnya tekanan penduduk. Padahal, perladangan berpindah telah dipraktikkan lebih dari lima ratus tahun dan kualitas tanah tersebut tidak rusak atau erosi. Pemerintah tidak memahami pola pertanian masyarakat karena masyarakat lokal Papua menggunakan pola pertanian campuran yakni memadukan antara tanaman subsisten dengan hortikultura pada saat bersamaan dalam satu kebun.

Bagi para peladang, dengan menerapkan sistem ladang berpindah maka mereka lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekologis (lingkungan) di sekitar dan melepaskan diri dari praktik pertanian yang bersifat destruktif dan tidak berkelanjutan (Namgyel et al. 2008). Setelah masa panen, para peladang berpindah dan mencari lahan baru. Lahan yang ditinggalkan akan berada dalam masa bera (*fallow period*), masa di mana lahan tidak dapat ditanami apapun hingga menunggu pohon-pohon tumbuh kembali (belasan hingga puluhan tahun). Lalu, peladang akan kembali lagi ke lahan tersebut ketika telah tumbuh pohon-pohon dan mulai untuk menebang kembali, kemudian membakar kayu-kayu dan ranting (*slash-and-burn farming*), dan kemudian dapat ditanami kembali (Potter 2009).

Artikel ini menemukan bahwa pola pertanian campuran ini merupakan pilihan (*choices*) dan pengambilan keputusan (*decision-making*) perempuan

lokal Papua, yang mencampurkan antara tanaman tradisional dengan tanaman komersial dalam satu kebun. Pilihan perempuan lokal Papua ini berbeda dengan beberapa studi pertanian yang menunjukkan bahwa petani memutuskan meninggalkan tanaman subsisten dan berkeputusan untuk mengganti lahan mereka ditanami tanaman komersial, sehingga berimplikasi pada rentannya otonomi pangan lokal dan bergantung pada naik turunnya harga tanaman komersial di pasaran global (Finnis 2006; Li 2014). Fluktuasi harga tanaman di pasaran global ini benar-benar di luar kendali petani, dan membuat mereka menjadi rentan. Meski mempunyai aspirasi ekonomi, petani lokal Papua tidak mengorbankan semua lahan mereka menjadi tanaman komersial.

Demikian juga, dalam pilihan dan pengambilan keputusan terhadap pestisida dan herbisida. Mereka tidak menggunakan pestisida terhadap semua tanaman, kecuali ketika hama menyerang dengan masif di daun tanaman selama masa perawatan. Penemuan penelitian ini menunjukkan mama-mama petani mempunyai suara signifikan dalam menentukan pilihan-pilihan dan pengambilan keputusan dalam ladang berpindah dan proses selama pemasaran. Pilihan dan pengambilan keputusan semakin meredup ketika perladangan berpindah bergeser ke pertanian menetap yang modern.

Kebebasan dalam memilih juga terlihat pada keterlekatan relasi antara pertanian, kekerabatan, politik marga, praktik ekonomi dan agama. Dalam riset ini peneliti tidak melihat pertanian sebagai sistem yang sifatnya teknis dan terlepas dari kondisi sosial lainnya melainkan terdapat keterhubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Di samping itu, corak ekonomi tradisional melekatkan unsur-unsur relasi sosial dengan transaksi ekonomi menjadi satu kaitan utuh, seperti yang disebut sebagai *embeddedness* atau keterlekatan (Granovetter 1985). Namun, keterlekatan (*embeddedness*) tidak selamanya dapat diterapkan dalam pertanian modern (*sedentary farming*).

Dunia ekonomi modern memisahkan peranan produksi dan pemasaran, sementara ekonomi tradisional tidak memisahkan produksi, perawatan dan distribusi pemasaran. Praktik perladangan tradisional tidak memisahkan antara rumah tangga dan ekonomi. Suami dan istri terlibat bekerja sama, khususnya dalam masa perawatan. Terkadang anak laki-laki diminta untuk membeli benih dalam skala banyak diluar kota. Demikian juga, ketika masa persiapan pemanenan, peladang tradisional melibatkan institusi agama di dalamnya sebagaimana yang akan peneliti jelaskan di pembahasan di bawah.

Metode

Penelitian ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana perempuan melanjutkan tradisi berladang mereka namun pada saat yang sama merespon kebutuhan pasar dengan menanam tanaman komersial (*cash crop*). Penelitian ini juga menelusuri bagaimana kinerja ekonomi perempuan di ladang, dalam hal apa saja perempuan dilibatkan untuk pengambilan keputusan di sektor produksi, perawatan tanaman, dan distribusi pemasaran. Serta, faktor apa saja yang mempengaruhi perempuan terlibat atau tidak terlibat dalam perladangan?

Penelitian ini dilakukan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Maybrat (dataran tinggi) dan Kabupaten Sorong (dataran rendah), Provinsi Papua Barat. Riset ini dimulai pada pertengahan awal Juni dengan menelusuri sumber-sumber sekunder berkaitan dengan profil pertanian dan perempuan di dua kabupaten ini. Selama bulan Juli 2019, pengumpulan data lapangan dilakukan di dua kabupaten tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion / FGD*). FGD dan wawancara terstruktur dilakukan sebagai pertimbangan karena durasi penelitian apabila menggunakan partisipasi-observasi, dan di satu sisi juga dengan menggunakan metode diskusi kelompok terfokus peneliti dapat melakukan interaksi dengan partisipan (informan) terkait dengan topik yang sulit untuk diobservasi sekaligus dapat menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perhatian dalam metode pengumpulan data (Suter 2000). Di samping melakukan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun dengan baik, pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur yang diakhiri dengan mengikuti para petani perempuan (observasi-partisipasi) ke masing-masing ladang yang tengah mereka kerjakan di Kabupaten Maybrat.

Penentuan informan dimulai dengan menghubungi beberapa instruktur Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan di kedua kabupaten, Sorong dan Maybrat. Lalu, melalui Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dari dua dinas ini, peneliti dihantarkan kepada kelompok tani yang berada di dua kabupaten, Sorong dan Maybrat untuk melakukan FGD. Teknik *snowball informants* menjadi pilihan yang cukup efektif karena sulitnya akses untuk meraih subjek (informan) yang akan diteliti (Naderifar, 2017). Nama petani (lokal), baik laki-laki dan perempuan, dan PPL disamarkan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian. Hal ini dilakukan tidak hanya dengan sekedar mengubah nama (anonimitas), melainkan juga

menjaga dan melindungi privasi informan sesuai dengan kesepakatan dengan informan dalam upaya-upaya peneliti mengumpulkan data (wawancara, dokumentasi, dan sebagainya) (Spradley 2007).

Penelitian ini mewawancarai 19 petani perempuan dan mewawancarai 26 petani laki-laki. Sebagian dari para petani laki-laki tersebut adalah suami dengan perempuan diwawancarai atau masih berhubungan saudara, seperti anak menantu atau saudara perempuan. Untuk membandingkan hasil wawancara penelitian ini juga mewawancarai 11 petugas di Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan di dua kabupaten. Semua petani yang diwawancarai adalah petani lokal Papua, yakni mereka yang menganggap dirinya sebagai Orang Asli Papua (OAP) dan mempunyai ras Melanesia. Di Kabupaten Sorong, petani yang diwawancara adalah Suku Moi yang tinggal di Kampung Aimas, Klademak dan Klasaman. Sedangkan di Kabupaten Maybrat petani diwawancara adalah dari Suku Aymaru dan Aifat yang tinggal di Kampung Aymaru, Kampung Aisyo, Kampung Kisor dan Kampung Aitinyo. Untuk mendapatkan pola jawaban dari pertanyaan riset, peneliti melakukan pengelompokan jawaban yang serupa dari berbagai hasil perbincangan yang berbeda. Harapan dari pendekatan ini agar kemiripan antara petani lokal di Kabupaten Sorong dan Maybrat dapat ditemukan, dan harapannya praktik ekonomi perempuan pada perempuan di ladang berpindah dapat dicari keserupaan maupun perbandingannya dengan daerah lain.

Di Kabupaten Maybrat, penelitian ini melihat peran perempuan di sektor produksi andalan yakni kacang tanah, sedangkan di Kabupaten Sorong, komoditas andalan mereka adalah tomat. Kabupaten Maybrat terletak di dataran tinggi dan cocok untuk ditanami umbi-umbian, jagung, dan kacang tanah adalah tanaman andalan dalam mendatangkan uang kontan skala besar. Petani juga menanam tanaman hortikultura seperti lombok, tomat, dan terong. Sedangkan Kabupaten Sorong terletak di dataran rendah berawa. Para petani transmigran Jawa di beberapa distrik lebih menguasai lahan pertanian dibanding petani lokal Papua.

Penduduk di Kabupaten Maybrat mencapai 38,067 dengan luas tanah 5,461 km persegi (BPS 2015). Kabupaten Maybrat mempunyai populasi penduduk yang lebih homogen dibanding Kabupaten Sorong. Mayoritas suku di kabupaten ini adalah orang Aifat dan Aymaru yang mencapai hingga 74% dan diikuti oleh suku Arfak mencapai 21,16% dan sisanya adalah pendatang. Bahkan orang Jawa di kabupaten ini hanya mencapai 0,36% (Ananta et al. 2010). Maybrat adalah kabupaten

yang baru didirikan pada tahun 2009 setelah dimekarkan dari Kabupaten Sorong. Sedangkan Kabupaten Sorong lebih heterogen di mana 50% lebih penduduknya adalah pendatang dari Jawa dan sisanya adalah etnis pendatang lainnya, seperti Bugis, Buton, Makasar dan Toraja. Suku asli di Kabupaten Sorong adalah orang Moi yang persebarannya hingga ke Kabupaten Raja Ampat di sebelah utara. Pada tahun 2010, populasi di Sorong mencapai 192,000 dan pada tahun 2020 populasi di kabupaten ini diproyeksikan mencapai 261,000 (BPS 2015). Populasi di Kabupaten Sorong mencapai lebih dari 10 kali lipat dengan penduduk di Kabupaten Maybrat. Sedangkan luas tanah di Kabupaten Sorong 7,415km persegi. Kondisi tekanan penduduk inilah yang tidak memungkinkan perladangan berpindah di pusat-pusat Kabupaten Sorong kecuali di kawasan pinggiran.

Petani Berpindah sebagai Kecerdasan Masyarakat Lokal

Pada daerah yang mempunyai tingkat populasi rendah, seperti Kabupaten Maybrat dan di pinggiran Kabupaten Sorong, perladangan berpindah masih mayoritas dilakukan. Namun demikian, dalam pandangan pemerintah yang teknokratik dan berorientasi ke pasar, sistem pertanian ini adalah tertinggal karena masih dilakukan dengan komunal, berorientasi subsisten, tidak tanggap teknologi, tidak menggunakan pupuk dan tidak diproduksi secara besar. Sebaliknya penelitian ini melihat sistem perladangan berpindah justru rasional dan adaptif dalam pandangan masyarakat lokal. Sistem ini mampu meminimalkan risiko terkena serangan hama, rumput liar, dan biaya ongkos produksi pada buruh (*labor intensive*). Perladangan berpindah tidak destruktif terhadap tanah. Masyarakat juga memodifikasi sistem perladangan dengan merespons perubahan lingkungan dan kondisi harga komoditas di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan meragamkan tanaman antara subsisten dan komersial. Dalam satu lahan, petani menanam keladi, pisang, dan pada saat yang sama juga menanam sawi, tomat, lombok, terong dan kacang tanah. Tanaman komersial ini disebut juga sebagai "tanaman intervensi" karena pertama kali diperkenalkan oleh petugas pertanian dan para petani transmigran Jawa.

Namun demikian, tanaman berpindah mempunyai kelemahan yakni ia akan tergeser karena tekanan penduduk yang menyebabkan petani harus menetap. Khususnya untuk Kabupaten Sorong yang merupakan daerah transmigrasi terbesar kedua di Papua dan Papua Barat setelah Merauke (Ananta 2010; Upton 2009). Tekanan penduduk menyebabkan petani melakukan

intensifikasi seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Ditambah dengan "banjirnya" para migran sukarela setelah desentralisasi tahun 2001 ke Sorong, membuat kawasan ini hampir sepenuhnya dikuasai oleh pendatang (pedagang dan petani hortikultura). Sedangkan bagi petani di Kabupaten Maybrat, mereka menganggap bahwa petani yang menetap adalah "orang miskin" karena mereka tidak mempunyai tanah yang luas dan terus menggarap tanah yang sama. Petani di Kabupaten Maybrat menganggap bahwa tidak masuk akal jika pertanian harus menetap di kawasan ini karena luasnya tanah yang tersedia dan sedikitnya jumlah penduduk.

Ketika terjadi migrasi besar-besaran dalam program transmigrasi dan deforestasi karena investasi sawit di pinggiran Kabupaten Sorong, para petani berpindah ini terdesak. Mereka berpindah ke arah yang lebih dalam di kaki-kaki bukit. Namun demikian, hutan yang dibuka bukanlah hutan primer melainkan hutan sekunder, yakni hutan yang telah pernah dibuka untuk ladang dan ditinggalkan dua hingga tiga tahun. Petani berladang ini tidak melakukan sistem berpindah ekstensif dengan mekanisasi produksi karena terbatasnya teknologi yang digunakan seperti gergaji mesin, motor tempel atau traktor tangan. Hal ini terlihat dari jarangnyanya padang rumput yang terbuka akibat pembukaan lahan.

Kondisi curah hujan juga cukup mendukung sistem perladangan berpindah. Berbeda dengan di Jawa, di mana curah hujan telah diprediksi dengan baik terjadi setiap enam bulan sekali, kondisi hujan yang datang silih berganti pada beberapa kali musim kering membuat penanaman ladang berpindah tidak dapat mengandalkan sistem irigasi. Hal ini berbeda dengan kondisi pertanian menetap yang telah dipraktikkan di kawasan transmigrasi seperti distrik Aimas dan Salawati di Kabupaten Sorong. Para petani khususnya laki-laki harus mengangkut air dengan bantuan mesin pemompa dari sungai terdekat. Sedangkan pada masyarakat petani, ladang yang masih dekat dapat disirami dengan air yang disambungkan dengan selang dari dapur.

Untuk meragamkan praktik perladangan, dalam beberapa hal para petani ladang melakukan pertanian berpindah dengan memasukkan tanaman hortikultura. Mereka juga meragamkan kegiatan dengan cara berburu babi dan menangkap ikan air tawar di Danau Ayamaru atau di sungai. Tindakan ini adalah praktik ekonomi campuran (*mixed economy*) di mana benih tanaman subsisten lebih banyak ditekankan seperti buah-buahan, pisang, sedangkan tanaman hortikultura lebih ditata rapi meski dengan tanpa bedeng.

Dengan konsep ekonomi campuran yang dibahas dalam artikel ini, artikel ini berpendapat bahwa pandangan tentang petani yang tidak responsif terhadap pasar dan terbelakang, adalah sebuah mitos. Para petani adalah pegiat yang sangat responsif terhadap pasar dan mempunyai struktur sosial ekonomi yang berbeda. Namun mereka bukan masyarakat yang terisolir. Hal ini terlihat dari cara mereka meragamkan tanaman dari subsisten hingga hortikultura yang paling terbaru.

Keragaman itu tampak pada kemampuan perempuan petani dalam memonetisasi produksi yang juga bagian dari subsisten, buah-buahan liar seperti durian, rambutan, manggis. Juga babi hutan, rusa, ikan, madu, jagung, sayuran pakis. Para petani di Kabupaten Maybrat misalnya telah mempunyai hubungan dagang yang berjalan lama dengan para penadah di kota dan para petani menetap. Sebagai gantinya mereka mendapatkan pertukaran seperti uang kontan, garam, beras, tembakau, bahan-bahan perumahan, serta kain timur untuk membayar biaya pernikahan bagi laki-laki.

Petani Maybrat menyebut tanaman hortikultura sebagai *tanaman intervensi*. Disebut demikian karena tanaman ini diperkenalkan dari luar baik oleh petugas pertanian lapangan ataupun petani transmigran Jawa. Di mata pemerintah dan juga agen pembangunan lainnya, petani berpindah dianggap tidak produktif dan subsisten. Penggunaan pertanian intensif justru merusak tanah karena tebalnya kandungan kimiawi dari pupuk dan herbisida. Sebaliknya, perladangan berpindah adalah pertanian berkelanjutan jangka panjang yang cukup kompleks, variatif, dinamis dan responsif terhadap perubahan pasar, sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, jumlah demografi bertekanan rendah.

Sistem pertanian perladangan berpindah persis seperti yang digambarkan oleh Edmund Leach (1970) tentang petani di Burma dataran tinggi. Petani menyiapkan vegetasi, kemudian menunggu kering untuk dibakar. Sisa pembakaran menghasilkan abu berupa fosfat dan potassium yang menyuburkan tanah. Tanaman kemudian disemai dengan beragam tanaman, seperti ubi talas, ubi jalar, jagung, dan tanaman hortikultura terong, lombok, tomat, dan kacang tanah. Setelah enam bulan hingga satu tahun penanaman, daerah tersebut ditinggalkan. Tanah dibiarkan hingga kembali pulih dan ditanami tanaman jangka panjang, sehingga dengan sendirinya tumbuh menjadi hutan sekunder.

Seperti yang ditemukan dalam studi di Papua ini, siklus perladangan berpindah tidak mengakibatkan deforestasi dan penurunan kualitas tanah, serta tidak meninggalkan bentangan padang dengan semak

liar dan pakis di atasnya. Tumbuhnya hutan sekunder tentu saja mencegah luasnya erosi tanah dan ancaman banjir. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, para petani kembali ke daerah awal perladangan, beragam antara lima hingga enam tahun. Periode penanaman pengosongan tanah selama tahun-tahun ini menyusul penanaman selanjutnya memungkinkan regenerasi hutan dan humus. Semakin petani membuka hutan primer, maka semakin lama ia akan kembali ke awal ia bertanam, dan semakin muncul luas hutan sekunder (King 2012). Namun pilihan yang paling logis bagi mereka adalah tetap berputar pada hutan sekunder, alasannya jika hutan primer telah dibuka dengan luas, maka jarak dengan rumah mereka akan semakin jauh dan sukar untuk mengontrol babi hutan yang kadang datang menyerang.



Gambar 1. Petani lokal menanam pohon pisang (tumbuhan jangka-panjang/musiman) di area pertanian komersial dan subsisten.

Petani berpindah juga mendefinisikan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dengan baik. Laki-laki bertanggung jawab untuk menebang pohon, membuat lubang di tanah yang akan dibuat benih, membuat pondok di sekitar ladang. Sedangkan perempuan bertanggungjawab untuk menaburkan benih, menyangi dan memilih benih. Beberapa tugas dikerjakan bersama antara laki-laki dan perempuan,

seperti membersihkan semak, pembakaran melindungi lahan pertanian dari hama dan hewan-hewan, panen, dan distribusi hasil panen. Kondisi pembagian pertanian ini persis pula dalam gambaran studi Freeman (1955) pada masyarakat Iban di Kalimantan bagian utara. Sedangkan perbedaan studi Freeman dengan penelitian ini adalah pada sistem kepemilikan tanah di Kalimantan Utara yang secara tegas telah dibagikan antar individu. Sementara artikel ini akan membahas bagaimana kepemilikan tanah adat di Papua Barat membawa pengaruh terhadap perempuan.

Keterlibatan Perempuan di Ranah Produksi

Secara tradisional, pertanian di Papua tidak menggunakan hewan atau bajak untuk mengangkut muatan atau membantu pengolahan lahan. Hal ini menunjukkan sistem tenaga intensif yang dibagi antara laki-laki dan perempuan. Pilihan pembatasan penggunaan teknologi ini mempunyai kaitan erat dengan sistem kekerabatan. Sistem perkawinan eksogami, di mana perempuan berpindah keluar dari marga mereka merupakan "transfer tenaga kerja" (*labor transfer*) yang memungkinkan perempuan mengurus perladangan berpindah suaminya dan mengambil keputusan dalam kinerja ekonomi (Goody 1999; Graeber 2018). Sistem transfer tenaga kerja perempuan ini memungkinkan untuk melanjutkan tradisi pertukaran antar marga. Transfer tenaga kerja memungkinkan terjadi karena dua hal. Pertama, rendahnya teknologi dalam sistem perladangan sehingga perempuan masih mempunyai peran penting dalam kinerja perladangan. Hal ini yang akan ditunjukkan nanti bahwa semakin tinggi keterlibatan teknologi pertanian, semakin berkurang peran perempuan di dalamnya. Kedua, rendahnya tekanan penduduk juga mempunyai andil signifikannya tenaga kerja perempuan dan pengambilan keputusan ekonomi.

Sistem mas kawin (*bridewealth*) mengharuskan perempuan menikah dengan marga berbeda, misalkan marga Nau harus menikah dengan marga lain (seperti marga Wai). Pernikahan beda marga tersebut bertujuan untuk transfer kinerja perempuan di ladang setelah pihak perempuan menerima pembayaran Kain Timur. Kain Timur telah menjadi tradisi pertukaran perkawinan di sepanjang kawasan dataran tinggi kepala burung Papua Barat (Timmer 2011). Kain Timur yang diberikan beragam harganya antara 70 sampai dengan 100 juta tergantung kemampuan pihak keluarga laki-laki. Setelah pihak keluarga perempuan diberikan Kain Timur, maka sang perempuan wajib tinggal di pihak keluarga laki-laki dan

bekerja sama dengan suaminya di ladang. Penelitian ini menemukan justru dengan mas kawin Kain Timur dalam pernikahan, perempuan bukan hanya patut memberikan jasa pekerjaan di ladang, namun juga memiliki andil dalam mengambil keputusan untuk menentukan benih, merawat tanaman dan menjual hasil kebun di pasar. Laki-laki (suami) menentukan untuk lahan selanjutnya untuk dilakukannya penanaman. Mama Nau yang ditemui di Aitinyo menuturkan pegalamannya sebagai berikut:

Pai tua (suami) yang menentukan pindah lahan baru. Ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi nanti kita yang tentukan sama-sama mau tanam apa, hambur benih apa. Setelah itu perawatan sa yang ambil posisi.

Laki-laki mempunyai tiga peran utama, yakni menentukan lahan selanjutnya untuk ditanami, menebang pohon, membersihkan kebun dan membuat pos di kebun dari serangan binatang liar. Selebihnya, dalam perawatan tanaman dikerjakan bersama antara suami dan istri. Di bagian total perawatan perempuan mempunyai andil dalam memilih dan memutuskan produksi perladangan dari sejak membeli benih, kemudian perawatan menggunakan abu dan penjualan di pasar. Perempuan mempunyai andil dalam memilih benih yang disesuaikan dengan pasar. Sebagaimana mama Yau Kambuaya di distrik Ayamaru mengatakan:

Mama yang beli (benih), di toko-toko mereka sisipkan beli sayur-sayuran rica, tomat, bayam, buncis, gambas, cuma sayur dong jual.

Selain membeli benih, perempuan juga berupaya menyimpan benih lokal yang seringkali dibagi-bagi di antara kerabat marga masing-masing, seperti benih tomat lokal, cabai lokal (rica), dan umbi-umbian. Papua, terutama di Kabupaten Maybrat memiliki tomat lokal yang berbeda seperti yang dijual di pasar. Tomat lokal ini juga tidak perlu adanya perawatan intensif dibandingkan yang dijual di pasar. Mama Yau mengungkapkan:

Bisa produksi sendiri (tomat lokal dan cabai lokal), ini kita hambur begini tumbuh, besok kalo sudah, kasih bersih lahan lagi, baru angkat, cabut. Cabut, baru pergi tanam lagi ke lahan baru begitu.

Tomat yang dijual di pasar biasa lokal Papua menyebutnya dengan tomat "Jawa" atau tomat "apel" karena bentuknya yang besar. Tomat "apel" ini memerlukan perawatan layaknya pertanian yang dilakukan oleh transmigran Jawa yang lebih intensif daripada tomat lokal. Begitu pula dengan komoditas lain (seperti cabai dan umbi-umbian) yang dijual di pasar jauh lebih memerlukan perawatan intensif dibandingkan

dengan komoditas lokal. Perawatan tanaman kemudian menjadi suatu hal yang baru bagi mayoritas orang lokal Papua dikarenakan perlu adanya ketelitian. Mama Tomi di kampung Aitinyo mengungkapkan:

Saya kalo bikin tomat "Jawa" berarti bikin pertanian tadi. Kita harus bikin pertanian sudah. Kalo tanam sembarang dia tidak bagus, tanam, terawat, teratur, baru dia ada hasil. Tanam sembarang kalo lokal ini, sembarang.



Gambar 2. Perempuan lokal memegang tomat lokal dari benih yang disimpan

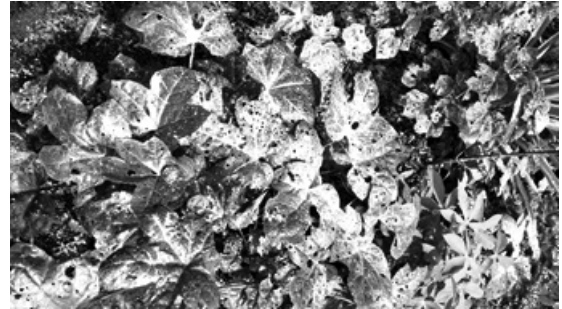
(retained seeds)

Perempuan mempunyai peran signifikan dalam menentukan pembelian benih. Khususnya di Kabupaten Maybrat, karena tidak ada toko pertanian, para pedagang keliling asal Jawa yang tinggal di Moswaren datang dengan menggunakan kendaraan bermotor ke Maybrat. Mereka menjual berbagai peralatan rumah tangga, plastik, hingga benih lombok, sawi, tomat, terong, dalam bentuk kemasan kecil (*sachet*). Benih ini digunakan untuk satu kali tanam dihamburkan ke lahan bersama tanaman subsisten lainnya, semacam keladi dan ubi jalar.

Anggaran pembelian benih seperti tomat, tidak lebih dari 50 ribu rupiah. Di Kabupaten Sorong, pembelian benih skala besar hingga 200 ribu rupiah diperkirakan dapat menghasilkan tomat mencapai di atas 300 kilogram. Ketika pembelian benih dalam skala yang lebih besar membuat perempuan tidak berangkat ke kota-kota sekitarnya, seperti Moswaren atau Teminabuan, melainkan mereka menyerahkan pada saudara laki-laki yang lebih muda seperti anak laki-laki atau adik kandung. Disinilah keterkaitan (*intersectionality*) terjadi di mana perempuan mempunyai penentuan dalam mengutus laki yang lebih muda untuk membeli kebutuhan pertanian di luar daerahnya.

Selain mengelola benih, perempuan juga berperan dalam membantu pemupukan tradisional untuk hortikultura yakni dengan menggunakan abu dari dapur atau sisa pembakaran kayu di saat membuka lahan pertama kali. Mereka membuktikan bahwa hanya

dengan menggunakan abu, hama di daun dan batang tumbuhan efektif terbunuh.



Gambar 3. Daun-daun tanaman ditaburi abu dapur hasil pembakaran kayu guna mengusir hama

Meski tidak menggunakan pupuk, pestisida, dan herbisida, pola ladang berpindah cukup efektif menghindari serangan hama. Hal ini berbeda dengan pola menetap seperti di pertanian transmigrasi. Jika terkena hama, petani tidak bisa berpindah akibatnya mengharuskan mereka menggunakan pupuk, herbisida dan pestisida kimia. Mama-mama yang ditemui di dua kabupaten mengaku beberapa kali didatangi oleh PPL yang memperkenalkan pemupukan kimia dan herbisida, namun mereka secara sadar melakukan pilihan dan pengambilan keputusan untuk tidak menggunakannya karena berbagai efek buruk. Mereka menyadari efek tersebut tidak saja merugikan tanah, namun juga terhadap tubuh mereka. Mama Yori yang ditemui di Klasaman Sorong mengakui:

Kita kalau makan sayur-sayuran pakai pupuk itu kaki sakit. Karena pakai obat to. Kalau kita pergi di pasar sana itu sayur bagus-bagus eh, lombok (*rica*), terong, sawi lah, semua terlihat bagus karena pakai pupuk. Kalau mama sengaja memang tidak mau pakai pupuk, tapi kalau ada lainnya macam biogas itu mama mau belajar.

Selain persoalan dampak terhadap tubuh, alasan rumah tangga petani tidak menggunakan pupuk untuk meningkatkan produksi adalah implikasinya terhadap ongkos kerja dan transportasi. Penggunaan pupuk akan meningkatkan produksi yang nanti di masa panennya berimplikasi pada perekrutan tenaga kerja lebih besar. Berbeda dengan petani transmigran Jawa yang langsung melakukan perekrutan tenaga kerja secara langsung, petani lokal Papua menggunakan gereja sebagai institusi perekrutan. Sebelum pemanenan, petani mengumumkan ke gereja soal rencana panen sehingga jemaat akan membantu. Pihak gereja mendapatkan sekitar 10 persen dari total uang yang diserahkan oleh

petani. Petani memberikan derma dengan kisaran antara satu hingga dua juta. Jemaat akan membantu karena mereka juga berprofesi sebagai petani sehingga proses yang terjadi adalah resiprositas secara seimbang. Petani dapat merekrut pekerja untuk membantu membuka lahan baru dan membersihkannya. Upah yang diberikan antara 200-300 ribu perhari. Namun untuk pemanenan kacang tanah misalnya, di atas lahan seperempat hektar, dibutuhkan lebih dari lima orang sehingga gereja mempunyai peran penting dalam mengkonsolidasi tenaga kerja.

Efek peningkatan produksi lainnya adalah pada ongkos transportasi. Jika panen tanaman lebih dari lima karung, petani harus menjualnya di pasar-pasar sentral, semacam Teminabuan dan Pasar Remu, Sorong. Mereka harus berhitung dengan modal awal penyewaan transportasi, dan menurunkan harga bersaing dengan produk yang sama di pasar sentral tersebut. Dengan demikian, peningkatan produksi sama dengan peningkatan resiko ongkos pekerja dan resiko jual yang belum tentu menguntungkan. Dari wawancara ditemukan bahwa pada umumnya petani mengeluhkan bahwa mereka pernah meningkatkan produksi, seperti padi ladang dan kacang tanah, namun permasalahannya tidak ada institusi semacam koperasi besar atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mampu menampung kelimpahan produksi.

Peran Perempuan di Pertanian Modern

Perempuan mempunyai peran signifikan dalam perladangan berpindah sebagaimana yang diungkapkan di atas. Namun, berkembangnya teknologi (alat) pertanian membuat laki-laki lebih memiliki peran utama dalam menggarap lahan pertanian, sehingga menggeser peran perempuan. Pertanian modern menempatkan peran perempuan seolah-olah kurang efisien dan berpendapatan rendah (Majumder dan Shah 2017). Hal ini tentunya membuat perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga (*housekeepers*) akan bergeser sekedar menjadi ibu rumah tangga (*homemakers*) dalam lingkup keluarga inti (Adams 1991; 2004). Berbeda dengan pertanian tradisional, pertanian modern mengkonsentrasikan ongkosnya pada tiga hal; biaya perawatan seperti pupuk dan herbisida, upah pekerja, dan ongkos transportasi. Biaya sosial dapat ditekan sehingga petani dapat mengkonsentrasikan pada tiga biaya utama diatas.

Sebagai perbandingan, penelitian ini melakukan wawancara kepada petugas PPL di Distrik Salawati

Kabupaten Sorong, Pak Rode, ia mengungkapkan bagaimana petani transmigran Jawa di distrik ini telah menerapkan mekanisasi produksi pertanian.

Tanam satu hektar padi itu kan seharusnya perlu 8 orang dua hari, kalau menggunakan mesin tanam cuma traktor sehari selesai, tanpa harus pake 8 orang. Dua orang saja sudah cukup

Distrik Salawati dan Aimas menjadi contoh perbandingan pertanian menetap yang telah umum dilakukan oleh masyarakat Jawa transmigran di Sorong. Mekanisasi dan intensifikasi pertanian sawah menetap di distrik ini mengurangi peran perempuan di ranah pertanian (Ember 1983). Pertanian modern menerapkan sistem menetap (*sedentary system*) sehingga ketika hama menyerang, petani harus menggunakan pestisida. Contoh yang digunakan dalam sistem pertanian modern ini lebih banyak berbasis di Kabupaten Sorong, khususnya Distrik Aimas. Petani lokal dari suku Moi banyak terinspirasi dari sistem pertanian menetap para transmigran Jawa. Petani lokal ini membuat bedengan (*raised beds*), menggunakan herbisida untuk mengontrol hama, pupuk sintetis "Mutiara", "1616 NPK", dan hasil penjualan mulai melibatkan penadah yang datang langsung ke area kebun. Meski mampu memotong biaya transportasi, para penadah ini yang menentukan harga di bawah standar pasar. Karena itu, untuk menutupinya petani harus memproduksi lebih tinggi. Dalam prosesnya, dari produksi, perawatan hingga penjualan perempuan mempunyai peran yang lebih sedikit dibanding dalam pertanian tradisional.

Penelitian ini menemukan ketika petani berhasil meningkatkan produksi pertanian mereka dengan cara mekanisasi, perempuan tidak kehilangan perannya sebagai ibu rumah tangga. Karena hibridisasi tanaman, bukan intensifikasi, mereka tetap mempunyai peran pentingnya di pasar, yakni menjual hasil kebun jangka panjang atau musiman, seperti pisang. Teknologi yang kian berkembang menggeser peran perempuan dalam pertanian. Penggunaan alat pemotong rumput secara langsung dapat membatasi rumput liar dengan cepat. Perempuan yang biasa memiliki peran dalam mencabut rumput pun tergeser oleh laki-laki. Penggunaan mesin pencabut rumput juga menguntungkan laki-laki karena mendapatkan bayaran sewa alat dan tenaga membantu memotong rumput di lahan lainnya. Seorang mama Kambuaya di distrik Ayamaru mengungkapkan,

Ini ada laki-laki bawa mesin babat bawa ke sini, kalo orang yang suruh bawa babat sini itu bayar Rp 300.000 (ribu rupiah) baru dong (Dia) babat.



Gambar 4. Petani lokal Papua laki-laki menggunakan mesin pancabut rumput pada pertanian campuran tradisional ke modern.

Ketika peladang berpindah mulai menetap, seperti beberapa contoh kasus yang ditemukan di Kabupaten Sorong, perempuan mulai kehilangan kontribusinya di bidang perawatan tanaman. Hal ini terjadi ketika suami mereka mulai menggunakan pupuk, pestisida dan herbisida kimiawi. Semenjak petani menggunakan herbisida kimiawi, peranan perempuan dalam mencabut rumput juga berkurang. Alasannya, mereka enggan untuk mencabut rumput yang telah disemprot bahan kimia sebelumnya. Demikian juga dengan teknologi mesin pemotong rumput, traktor tangan yang semuanya digunakan oleh laki-laki.

Sedangkan di ranah distribusi pasar, dengan skala panen yang besar hingga tiga ton untuk tomat, maka petani memerlukan penadah (*middlemen*) untuk membeli harga. Masuknya jasa penadah ini merupakan penanda atau pembatas antara sektor produksi pertanian dengan sektor pemasaran. Tidak seperti di pertanian tradisional di mana keduanya dikelola secara bersambung oleh perempuan, pertanian modern tidak lagi terlibat dalam sektor distribusi pasar karena jumlah produknya yang besar dan ketetapan harga yang juga diluar kendali mereka. Peran penadah memotong peran perempuan yang biasanya langsung menjual hasil panen skala kecil mereka ke pasar atau depan rumah.

Namun demikian, menariknya, mama-mama di Kabupaten Sorong masih mempunyai peran ketika suami mereka menerapkan sistem pertanian menetap. Perempuan tetap ke pasar menjual hasil kebun semacam pisang, keladi, ubi jalar, daun dan bunga papaya. Selama masa penanaman, tanaman subsisten disisipkan di tengah-tengah tanaman komersial lainnya yang ditanam dengan skala besar dan dijual ke penadah.

Perempuan di Ranah Distribusi Pasar

Petani tradisional di lahan berpindah dengan sengaja membuat lahan mereka tercampur antara

produksi untuk kebutuhan ekonomi dan kebutuhan subsisten. Campuran lahan ini dikerjakan dengan kurang dari 0.25 hektar, sehingga tidak melibatkan tenaga kerja yang besar. Hasil produksi tanaman adalah lebih beragam dibanding besar dan seragam. Karena itu petani tidak membutuhkan penadah (tengkulak) yang akan mengambil hasil kebun mereka. Perempuan yang menjualkan hasil kebun mereka ke pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah mereka. Bagi mereka, ini adalah pasar yang efektif dibanding harus ke pasar sentral karena mereka dapat mondar-mandir mengurus rumah sembari berjualan. Mama Yaru di distrik Ayamaru mengatakan

Kalo mama dorong (mereka) punya pasar begini saja. Tidak bisa bawa ke pasar, macam di Sorong itu tidak ada [...] Kalo mama lebih senang yang begini (menjual di depan rumah), cepat habis.

Di distrik Ayamaru, pemerintah membangun pasar sentral untuk mama-mama, namun pasar ini tidak digunakan karena faktor produksi tanaman yang bukan dalam skala besar, melainkan kecil dan lebih praktis di jual di depan rumah. Produk hortikultura seperti sayur-sayuran hanya dijual di pinggir jalan karena batas waktu penyimpanan yang pendek dibandingkan tanaman-tanaman yang batas penyimpanan lebih lama seperti umbi dan kacang-kacangan.

Ketika komoditas yang dihasilkan lebih banyak, khususnya kacang tanah, perempuan di Distrik Ayamaru akan menjualnya ke pasar di Teminabuan dan Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan. Karena di Maybrat tidak ada tengkulak atau penadah yang membawa barang mereka, para mama menyewa transportasi. Alat transportasi tersebut berbentuk mobil empat gardan yang dapat memuat barang lebih banyak dan dapat menelusuri jalan yang masih terjal dan beberapa belum teraspal dengan baik. Mama Yaru mengungkapkan:

Mama deng mobil. Rp 250.000 per orang kalo barangnya beda, pisah. Kalo kacang tanah karung begini bayarnya satu mungkin berapa Rp 50.000 ka, Rp 55.000 ka begitu. Kalo bawa manusia itu Rp 250.000. Kalo pake Rp 1.500.000, bisa Rp 2.000.000 juta, kasih liat saja kalo banyak Rp 1.500.000. Mobil macam Hilux sudah.

Terdapat beberapa alasan mengapa petani tidak menjual produk mereka ke pasar sentral yang lebih jauh. Selain ongkos transportasi yang lebih tinggi, mereka melihat bahwa jika produk tersebut di jual di Moswaren, Teminabuan atau Pasar Sentral Sorong, maka harga akan kembali turun karena menyesuaikan dengan harga produk yang sama yang juga didatangkan oleh pedagang

besar dari berbagai tempat. Di kampung-kampung yang didatangi oleh peneliti, seperti di Kabupaten Maybrat, seperti distrik Ayfat dan Aitinyo, petani hanya akan menjual produk pertanian mereka keluar kota yang lebih besar, jika rata-rata produk di atas tiga sampai lima karung. Jika jumlah produk pertanian yang akan dijual masih di bawah itu, maka mereka akan menjualnya di pasar-pasar kecil depan rumah.

Seperti dalam beberapa riset mengenai peran perempuan di pasar (Alexander 1987; Brenner 1998), perempuan di dua kabupaten dalam penelitian ini juga memegang peranan penting dalam pemasaran hasil pertanian dan alokasi uang pasca penjualan. Petani perempuan di Kabupaten Maybrat mempunyai peran penting untuk mengolah hasil keuangan pasca panen. Selain diputar untuk membeli benih, hasil produksi dari pertanian lebih banyak dialokasikan untuk modal menjalin relasi sosial seperti membayar denda, biaya sekolah, membagi uang kepada keluarga besar dalam pembiayaan ritual khususnya pernikahan, dan biaya keagamaan di gereja khususnya persiapan pesta natal. Petani tidak hanya berurusan dengan maksimalisasi keuntungan, namun mereka juga harus bernegosiasi dengan tetangga dan marga. Dengan kata lain, keputusan ekonomi antara memutar modal dengan relasi sosial datang bersamaan. Lingkaran praktik ekonomi campuran ini yang bagi pemerintah tidak dianggap produktif dan rasional karena rendahnya alokasi keuntungan pasca panen yang diputar kembali untuk pembelian bibit dan pupuk, tidak adanya alokasi untuk pembelian alat atau teknologi pertanian yang lebih modern atau alokasi untuk penambahan tenaga kerja.

Pada saat para petani lokal Papua telah menerapkan pertanian modern (*sedentary farming*), maka kontribusi perempuan dalam pertanian akan menjadi menurun, terutama dalam mendistribusikan dan menjualkannya ke pasar. Hal ini dikarenakan beberapa di antara petani lokal Papua yang telah menetap telah menggantungkan diri mereka kepada penadah (*middlemen*/tengkulak) yang akan membawa komoditas tani mereka ke pasar, sehingga perempuan pun tak perlu menjualkannya ke pasar. Meskipun di beberapa kasus terdapat petani lokal yang tidak menyukai penadah dikarenakan cara mereka menentukan dan memotong harga komoditas kepada petani hingga 50%.

Pasarnya Rp 20.000, biasanya setor, mereka yang beli, penadah itu beli tidak jujur juga, harga di pasar lain. Di sana di pasaran harganya mungkin Rp 20.000, tapi mereka kasih tahu ke kita harga tomat Rp 10.000.

Penelitian ini menemukan beberapa praktik dan pandangan yang penting yang ditemukan dalam komunitas petani dan mama-mama di kedua kabupaten yang diteliti ini. *Pertama*, kemanfaatan dari jalan Trans-Papua bagi petani, sangat ditentukan oleh besarnya produk pertanian yang mereka hasilkan. Bagi petani, jalan Trans Papua terasa gunanya ketika mereka memanen skala besar karena ongkos transportasi menuju pasar dapat ditekan. *Kedua*, makna pasar bagi mama-mama Papua sebenarnya bukanlah di pasar sentral. Ide berjualan di pasar sentral sebenarnya cukup diperuntukkan bagi pedagang pendatang dari Jawa, Makassar, maupun Bugis. Pasar bagi mama-mama adalah tempat di mana dapat terjadi pertukaran dan tidak harus terpusat. Ia dapat dilakukan di samping jalan, depan kebun, atau dekat rumah. Karena itu, sepanjang Kabupaten Sorong hingga Maybrat banyak gubug ataupun bangunan kecil permanen setiap beberapa puluh meter yang merupakan tempat mama-mama berjualan.

Kesimpulan

Para peladang berpindah dengan sengaja membatasi skala produksi mereka sebagai pilihan ekonomi. Tanah yang ditanami kurang dan lebih dari satu per empat hektar, dan petani membeli benih tidak lebih dari 200 ribu rupiah, tidak dipupuk pestisida dan menjual komoditas tidak lebih dari 300 kg (3 kuintal) merupakan pilihan yang bernilai dibanding harus mengorbankan keterlekatan (*embeddedness*) antara relasi sosial dengan transaksi ekonomi. Dalam pertanian tradisional, perempuan mempunyai peran yang sifatnya terkait baik di ranah sosial dan ekonomi. Pertama mereka menjalankan sistem pertanian subsisten yang bertujuan untuk sekuritas pangan, sekaligus mengapresiasi pasar komersial dengan menanam tanaman yang dapat diserap pasar dengan baik.

Dalam pertanian ladang, petani perempuan mempunyai andil penting dalam memadukan model ekonomi campuran ini. Logika dari ekonomi campuran ini adalah petani perempuan mempertimbangkan relasi sosial dan agama serta perhatian pada kondisi ekologi. Para petani tidak hanya memikirkan cara untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi semata melainkan juga menjaga kebaikan relasi sosial. Perempuan mempunyai andil untuk tidak meningkatkan produksi pertanian karena hal tersebut akan berimplikasi pada rantai produksi dan pemutusan relasi sosial yang digantikan dengan relasi transaksional. Misalnya bagaimana upah tenaga kerja menghilangkan peran gereja, mekanisasi mesin, hingga hilangnya peran

perempuan sendiri. Dengan demikian, peranan signifikan perempuan adalah menyeimbangkan antara pertanian sebagai praktik transaksi ekonomi dengan relasi sosial.

Di mata rejim pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, pertanian berpindah dianggap tidak produktif karena tidak meningkatkan pemasukan uang kontan secara signifikan. Meski demikian, pertanian berpindahlah yang cukup ramah lingkungan. Di titik inilah kebijakan ekologis berbenturan dengan ambisi pertumbuhan ekonomi, dan petani lokal Papua dalam penelitian ini mampu mencampurkan keduanya dengan tanpa melukai tanah dengan penyemprotan bahan-bahan kimiawi.

Sebagai penutup, penelitian ini menemukan bahwa dunia tradisional yang selama ini dipandang khalayak luas lebih rendah dari dunia modern tidaklah terbukti. Perempuan di dunia pertanian tradisional mempunyai tempat signifikan dalam pengambilan keputusan dan kebebasan memilih. Sedangkan ketika beranjak ke pertanian modern, petani perempuan hanya berkecimpung di tanaman subsisten dan kehilangan perannya dalam mengurus tanaman komersial. Ketika pertanian modern merambah, posisi perempuan justru tampak menyusut. Penelitian ini menemukan bahwa dalam sektor pertanian di kedua kabupaten di Papua ini, modernisasi justru meminggirkan perempuan dalam perannya di sektor pertanian tradisional.

Daftar Pustaka

Adams, Jane 1991, "Women's Place is in the Home: The Ideological Devaluation of Farm Women's Work", *Anthropology of Work Review*, Volume XII, Number 4, volume XIII, Number 1. h. 1-11.

Adams, Jane 2004, "The Farm Journal's Discourse of Farm Women's Femininity", *Anthropology and Humanism*, vol. 29, Issue 1, h. 45-62.

Alexander, Jennifer 1987, *Trade, Traders, and Trading in Rural Java*, Oxford University Press, Singapore.

Ananta, A, Utami, Wilujeng, DR & Handayani, NB 2010, "Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia", *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol. 3, no. 3, h. 458-474

BPS 2015, Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Distrik di Kabupaten Maybrat, 2015. <https://maybratkab.bps.go.id/statictable/2017/04/18/4/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-distrik-di-kabupaten-maybrat-2015.html>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2019.

Boeke, JH 1953, *Economics and Economic Policy of dual Societies*, Institute of Pacific Relations, New York.

Boekorsjom, T 2012, "Accused of Being a Separatist" dalam Visser, L, *Governing New Guinea, An Oral History of Papuan Administrators, 1950-1990*, KITLV Press.

Brenner, S 1998, *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*, Princeton University Press Ann Arbor, Michigan.

Ember, CR 1983, *The Relative Decline in Women's Contribution to Agriculture with Intensification*, *American Anthropologist*, American Anthropological Association (AAA), h. 285-303.

Finnis, E 2006, *Why Grow Cash Crops? Subsistence Farming and Crop Commercialization in the Kollu Hills, South India*, *American Anthropologist*, 108(2), h. 363-369.

Freeman, JD 1955, *Iban Agriculture, A Report on the Shifting Cultivation of Hill Rice by the Iban Sarawak*, HMSO, London.

Goody, J 1999, *Production and reproduction: A comparative study of the domestic domain*, Cambridge University Press Cambridge.

Graeber, D 8 June 2018. "Debt, Service, and the Origins of Capitalism. Pidato disampaikan di Birmingham Research Institute of History and Cultures <https://www.youtube.com/watch?v=K0t50D4lQrs>

Granovetter, M 1985 "Economic action and social structure: the problem of embeddedness". *The American Journal of Sociology*. **91** (3): 487.

Janssen, B 2018, "Small Farms, Big Plans. Mechanization and Specialization as Measures of the Middle". *Culture, Agriculture, Food, and Environment (CAFE), The Journal of Culture and Agriculture*, vol. 40, Issue 2, h. 96-104.

Kadir, HA 2016 "Reconsidering the Cultural Geographies of State and non-State Spaces" *Kawalu: Journal of Local Culture*, vol 3, No. 2 (July - December).

King, VT dan Wilder, W 2012, *Antropologi Modern Asia Tenggara*, Kreasi Wacana.

Leach, ER 1970, *Political Systems of Highland Burma, A Study of Kachin Structure*, Ahtlone Press London.

Li, TM 2014, *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*, Duke University Press, Durham, 2014.

Majumder, J dan Shah P 2017, "Mapping the Role of Women in Indian Agriculture", *Annals of Anthropological Practice*, vol. 4, No. 2, h. 46-54.

Naderifar M, Goli H, Ghaljaie F 2017 *Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research*, Strides Dev Med Educ, 14(3) h.1-6.

Namgyel, U et al. 2008, "Shifting Cultivation and Biodiversity Conservation in Bhutan", *Conservation Biology*, vol. 22, Number 25, (Oct, 2008), h. 1349-1351.

Potter, L, "Production of People and Nature, Rice, and Coffee: The Semendo People in South Sumatra and Lampung". dalam Nevins, J dan Nancy Lee Pelusp [ed]. (2009). *Taking Southeast Asia to Market*. Selangor: Strategic Information and Research Development (SIRD).

Scott, JC 2011, *The Art of not being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*, Yale University Press, New Haven.

Spradley, JP 2006, *Metode Ethnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Suter, EA 2000 "Focus Groups in Ethnography of Communication: Expanding Topics of Inquiry Beyond Participant Observation", *The Qualitative Report*, 5(1), h. 1-14.

Timmer, J 2011, "Cloths of Civilisation: KainTimur in the Bird's Head of West Papua", *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 12:4, h. 383-401.

Tsing, Anna. "Contingent Commodities: Mobilizing Labor in and beyond Southeast Asian Forests" dalam Nevins, Joseph, and Nancy

Lee Peluso. 2018. *Taking Southeast Asia to Market: Commodities, Nature, and People in the Neoliberal Age*, h 27-42. Cornell University Press.

Upton, SI 2009, "The impact of migration on the people of Papua, Indonesia, *Thesis Dissertation*, Ph.D. University of New South Wales 2009.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Mayling Oey-Gardner (Universitas Indonesia)
3. Yacinta Kurniasih, PhD (Monash University)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
6. Dr (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Universitas Katolik Atma Jaya)
7. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



The Asia Foundation

